



Krisis Femisida di Meksiko sebagai Kegagalan Negara dalam Perlindungan Gender

Putri Rizka Nurwijedah Kadir

Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Hasanuddin, Indonesia

Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan No. KM. 10, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota
Makassar, Sulawesi Selatan, 90245

Korespondensi penulis: putputee23@gmail.com

Abstract. *Gender-based violence has become a growing global problem, but in Mexico, the phenomenon of femicide has reached a concerning crisis level. Femicide, or the killing of women because of their gender identity, reflects the most extreme form of inequality and injustice experienced by women in society. This study seeks to examine the femicide crisis in Mexico as a manifestation of the state's failure to fulfill its obligation to protect women's rights. Through a qualitative descriptive approach, this study analyzes how weak legal institutions, high rates of impunity, and a deeply rooted patriarchal culture exacerbate the situation of violence against women. In addition, this study also examines the extent to which Mexico has implemented international standards, especially the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), and how the state has failed to implement them effectively. Using the concept of state failure, this study concludes that the femicide crisis in Mexico is not only a social problem, but also reflects the state's structural inability to provide equal legal protection and justice for women. Therefore, there needs to be a comprehensive reform of the legal system and gender-responsive public policies based on human rights principles. Therefore, increasing institutional capacity and strengthening public accountability mechanisms are important steps so that the state is no longer negligent in handling femicide and is truly present for victims in a real and comprehensive manner.*

Keywords: *Femicide, Gender-Based Violence, State Failure, CEDAW, Mexico.*

Abstrak. Kekerasan berbasis gender telah menjadi permasalahan global yang terus meningkat, namun di Meksiko, fenomena femisida mencapai tingkat krisis yang memprihatinkan. Femisida atau pembunuhan terhadap perempuan karena identitas gender mereka, mencerminkan bentuk paling ekstrem dari ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang dialami perempuan dalam masyarakat. Penelitian ini berupaya mengkaji krisis femisida di Meksiko sebagai manifestasi dari kegagalan negara dalam memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak perempuan. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menganalisis bagaimana lemahnya institusi hukum, tingginya angka impunitas, serta budaya patriarki yang mengakar memperburuk situasi kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji sejauh mana Meksiko telah melaksanakan standar internasional, khususnya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), dan bagaimana negara gagal dalam menerapkannya secara efektif. Dengan menggunakan konsep *state failure*, penelitian ini menyimpulkan bahwa krisis femisida di Meksiko tidak hanya merupakan persoalan sosial, tetapi juga mencerminkan ketidakmampuan struktural negara dalam menyediakan perlindungan hukum dan keadilan yang setara bagi perempuan. Oleh karena itu, perlu adanya reformasi menyeluruh terhadap sistem hukum dan kebijakan publik yang responsif gender, berbasis prinsip hak asasi manusia. Maka dari itu peningkatan dengan kapasitas kelembagaan, serta penguatan mekanisme akuntabilitas publik menjadi langkah penting agar negara tidak lagi abai dalam menangani femisida dan benar-benar hadir bagi korban secara nyata dan menyeluruh.

Kata kunci: Femisida, Kekerasan Berbasis Gender, Kegagalan Negara, CEDAW, Meksiko.

1. LATAR BELAKANG

Kekerasan berbasis gender, terutama femisida, merupakan salah satu masalah paling serius dalam isu hak asasi manusia di Amerika Latin, dengan Meksiko sebagai salah satu negara yang paling terdampak. Dalam konteks ini, penting untuk dipahami bahwa femisida bukan sekedar bentuk ekstrem dari kekerasan terhadap perempuan, melainkan

pembunuhan yang terjadi karena identitas gender korban, yang sering dipicu oleh kuatnya budaya patriarki serta lemahnya perlindungan hukum. Oleh karena itu, penggunaan istilah femisida tidak hanya dimaksudkan untuk menyoroti kekerasan terhadap perempuan, tetapi juga untuk menekankan keterlibatan negara, baik melalui keengganan atau ketidakmampuannya dalam menyediakan mekanisme pencegahan dan penanganan yang efektif (Menjívar, 2017, p. 222). Akibatnya, femisida tidak dapat dilihat hanya sebagai aksi individu, melainkan sebagai cerminan dari kegagalan struktural negara, di mana lemahnya penegakan hukum dan sistem peradilan yang bias gender menunjukkan kelalaian negara dalam memenuhi kewajiban dasarnya untuk melindungi warganya. Dengan demikian, femisida di Meksiko bukan hanya masalah kriminalitas, melainkan juga mencerminkan ketidakadilan struktural yang mengakar dan lemahnya komitmen negara dalam menjamin perlindungan hak-hak perempuan secara menyeluruh.

Meksiko telah menjadi negara dengan krisis femisida yang menempati posisi kedua tertinggi di kawasan Amerika Latin, setelah Brasil, dengan jumlah kasus yang mengalami peningkatan signifikan. Untuk menggambarkan tingkat keparahan situasi ini, data terbaru dari Badan Statistik dan Geografi Nasional Meksiko (INEGI) melaporkan bahwa terdapat sekitar 3.739 perempuan yang meninggal akibat pembunuhan pada tahun 2023 (INEGI, 2025). Sementara itu, sebagai perbandingan, data dari Statista mencatat lebih dari 827 kasus pembunuhan terhadap perempuan dengan perkiraan mencapai 1,23 kasus per 100.000 perempuan pada tahun yang sama (Statista, 2025). Pada tahun berikutnya, yaitu 2024, Statista kembali melaporkan lebih dari 797 kasus serupa dengan tingkat pembunuhan sekitar 1,18 kasus per 100.000 perempuan, yang menunjukkan penurunan kecil secara kuantitatif (Statista, *Femicide rate in Mexico from 2017 to 2024 (number of victims per 100,000 women)*, 2025). Meski demikian, perbedaan angka dari berbagai sumber ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pencatatan dan klasifikasi pemerintah, di mana kasus femisida kerap kali disamarkan dalam kategori kejahatan umum, sehingga menyulitkan upaya penanganan berbasis gender. Di balik data tersebut, penting untuk dicatat bahwa meskipun terlihat adanya penurunan, masyarakat tetap meyakini bahwa jumlah sebenarnya jauh lebih tinggi karena banyak kasus yang tidak dilaporkan, tidak diproses, atau bahkan diabaikan oleh aparat penegak hukum.

Meskipun Meksiko telah menunjukkan komitmennya melalui penerapan Undang-Undang tentang femisida serta melakukan berbagai reformasi hukum, kenyataannya upaya tersebut belum mampu menurunkan angka femisida secara signifikan (Romero, 2024, pp. 5-6). Kenyataan ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum secara formal tidak

otomatis memberikan perlindungan yang nyata bagi perempuan. Hal ini juga menegaskan bahwa Undang-Undang saja tidak akan efektif untuk melindungi perempuan dari kekerasan berbasis gender tanpa penegakan hukum yang konsisten dan bebas dari diskriminasi. Selain itu, penanganan femisida secara tuntas sangat bergantung pada perubahan struktural yang menyeluruh, termasuk membenahi lembaga hukum yang masih bias gender serta mengubah budaya patriarki yang sudah mengakar. Oleh karena itu, mengatasi krisis femisida di Meksiko membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan tidak hanya terbatas pada perubahan aturan hukum saja.

Meksiko telah meratifikasi CEDAW pada tahun 1981 dan mengadopsi berbagai reformasi hukum untuk meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan, namun implementasi di lapangan masih jauh dari memadai. Meskipun upaya hukum telah dilakukan, Komite CEDAW mencatat bahwa reformasi tersebut belum secara signifikan mengubah kondisi umum akses perempuan terhadap keadilan, karena banyak kasus kekerasan berbasis gender yang tetap tidak ditangani dengan serius. Sejalan dengan itu, Komite CEDAW juga mengeluarkan General Recommendation No. 19 dan No. 35 yang menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan, termasuk femisida, merupakan bentuk diskriminasi berat yang harus dihapuskan. Namun demikian, dalam konteks Meksiko, komitmen terhadap CEDAW sering kali tidak diiringi oleh kebijakan konkret yang efektif di tingkat nasional maupun lokal. Dalam kerangka itu, CEDAW seharusnya menjadi instrumen penting untuk menekan angka femisida yang terus meningkat di negara tersebut. Sayangnya, dalam praktiknya, Meksiko dinilai belum berhasil memenuhi komitmen yang telah disepakati, sehingga mencerminkan adanya kesenjangan serius antara kewajiban hukum internasional dan realitas kebijakan domestik (Hayati, 2023, pp. 4-14).

Kondisi ini mencerminkan karakteristik negara lemah, di mana institusi tidak memiliki kapasitas atau kemauan politik yang cukup untuk menegakkan hukum dan melindungi warganya. Dalam kasus Meksiko, kelemahan tersebut semakin kompleks karena diperparah oleh budaya patriarki yang mengakar kuat dan ketidakpedulian terhadap kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, situasi ini diperburuk dengan adanya impunitas yang menjadi salah satu faktor krusial dalam memperparah kekerasan berbasis gender, karena impunitas sendiri umunya muncul dari kelambanan, ketidakcukupan, atau bahkan keterlibatan negara dalam mempertahankan ketimpangan gender. Akibatnya, korban atau keluarga korban yang melaporkan kasus femisida sering kali tidak memperoleh perlindungan atau dukungan dari negara, atau dengan kata lain pelaku tidak diadili secara layak. Bahkan dalam situasi tertentu, negara seolah lepas tanggung jawab ketika pelaku

bunuh diri setelah melakukan pembunuhan terhadap perempuan atau anak perempuan, sehingga tidak ada proses hukum yang berlangsung. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab mutlak atas kegagalannya dalam merespons kekerasan terhadap kelompok sosial perempuan yang rentan (Hefti, 2022, pp. 265-266). Kegagalan ini tidak hanya mencerminkan krisis hukum, tetapi juga menunjukkan ketidakmampuan negara dalam memenuhi kontrak sosial dasarnya, yaitu menjamin keselamatan dan keadilan bagi seluruh warga negaranya, termasuk perempuan.

Untuk mengatasi krisis femisida secara efektif, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang tidak hanya berfokus pada reformasi hukum, tetapi juga mencakup perubahan budaya dan peningkatan kapasitas institusi. Salah satu langkah awal yang esensial adalah peningkatan pemahaman oleh aparat penegak hukum itu sendiri terkait perspektif gender, agar mereka mampu menangani kasus kekerasan berbasis gender secara adil dan tidak bias. Selain itu, peningkatan anggaran untuk program perlindungan perempuan sangat penting karena tanpa dukungan finansial yang memadai, kebijakan yang telah dirancang akan sulit diimplementasikan secara maksimal. Tidak kalah penting, kampanye edukasi publik harus dilakukan untuk mengubah norma-norma sosial yang selama ini menormalisasi kekerasan terhadap perempuan dan memperkuat struktur patriarki. Artinya, pendekatan yang diambil harus mencakup kebijakan dari atas dan juga perubahan sosial dari bawah. Namun, sebaik apa pun kebijakan yang dibuat, tidak akan efektif jika negara tetap mengabaikan akar ideologis dari kekerasan berbasis gender. Oleh karena itu, dibutuhkan keberanian politik untuk mengubah nilai-nilai patriarkal yang masih tertanam dalam institusi negara dan masyarakat, agar perlindungan terhadap perempuan benar-benar nyata dan tidak sekedar simbolik.

Dengan menganalisis krisis femisida di Meksiko menggunakan perspektif teori negara lemah dan standar internasional seperti CEDAW, kita bisa memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang akar masalah serta strategi yang dibutuhkan untuk melindungi hak-hak perempuan secara efektif. Pendekatan ini penting karena femisida di Meksiko tidak hanya mencerminkan kejahatan individu, tetapi juga menunjukkan kegagalan negara secara institusional dalam memberikan perlindungan yang setara bagi semua warga. Oleh karena itu, muncul pertanyaan tentang bagaimana *state failure* dapat menjelaskan kegagalan Meksiko dalam mencegah femisida, dan seberapa efektif CEDAW dalam memperkuat perlindungan gender di tengah situasi keamanan yang kompleks. Tanpa adanya komitmen yang kuat, penegakan hukum yang adil, dan reformasi institusional yang menysasar akar budaya patriarki, upaya keluar dari krisis femisida akan

sulit tercapai. Jika tidak ada perubahan struktural yang menyeluruh, maka segala bentuk kebijakan atau ratifikasi internasional akan menjadi sekedar simbolisme saja tanpa membawa dampak nyata bagi kehidupan perempuan sehari-hari.

2. KAJIAN TEORITIS

State Failure

Konsep *state failure* merujuk pada kondisi di mana sebuah negara tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi dasar pemerintahan secara efektif, sehingga gagal memenuhi kebutuhan dasar warganya. Dalam kerangka ini, Rotberg (2004, pp. 5-7) menekankan bahwa negara lemah ditandai oleh ketidakmampuan dalam menyediakan keamanan, layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, serta infrastruktur yang memadai. Lebih lanjut, kondisi tersebut mengindikasikan bahwa negara gagal dalam membangun sistem hukum dan keterlibatan yang kredibel, sehingga tidak mampu menjamin stabilitas sosial maupun keadilan hukum bagi masyarakatnya. Akibatnya, negara-negara yang masuk dalam kategori ini biasanya tidak memiliki birokrasi yang berjalan dengan baik, kehilangan legitimasi dari masyarakat, dan gagal menjalankan tugas-tugas utamanya seperti memberikan perlindungan, layanan publik, serta menegakkan hukum secara konsisten (Griffiths., et al., 2008, pp. 108-109).

Dalam konteks femisida di Meksiko, konsep *state failure* menjadi landasan penting untuk melihat bahwa masalah ini bukan sekedar isu sosial, melainkan mencerminkan kegagalan struktural negara dalam menjalankan tugas utamanya yaitu menjamin keselamatan dan hak hidup warganya. Ketidakmampuan institusi negara dalam menangani kekerasan berbasis gender secara efektif menunjukkan rendahnya kapasitas dan kurangnya kemauan politik. Hal ini terlihat dari sistem peradilan yang bias gender, aparat penegak hukum yang kurang responsif, serta lemahnya sistem perlindungan bagi korban. Femisida tidak hanya menunjukkan cacatnya sistem hukum nasional, tetapi juga membuka ruang bagi pelaku kekerasan untuk bertindak dengan impunitas, karena tahu bahwa negara gagal menjamin akuntabilitas. Dalam kerangka ini, negara bukan hanya lalai, tetapi secara aktif memperkuat siklus kekerasan dengan membiarkan ketidakadilan terjadi dan gagal menyediakan perlindungan yang adil bagi perempuan.

Lebih dari itu, lemahnya institusi negara di Meksiko memperlihatkan bahwa persoalan femisida tidak bisa diatasi hanya melalui aturan hukum atau kebijakan formal saja. Ketiadaan sistem hukum yang dapat dipercaya bukan sekedar soal kekurangan dalam birokrasi, tetapi juga mencerminkan adanya ketimpangan kekuasaan yang membuat

kekerasan terhadap perempuan terus terjadi tanpa pertanggungjawaban. Ketika negara gagal membangun mekanisme yang responsif terhadap kebutuhan para korban, kepercayaan masyarakat terhadap negara sebagai pelindung hak-hak mereka pun ikut runtuh. Oleh karena itu, upaya mengatasi femisida harus mencakup pembenahan institusi negara agar lebih peka terhadap isu gender, sekaligus memperkuat kepercayaan publik bahwa keadilan adalah hak semua orang, bukan hanya milik segelintir pihak.

Standar Internasional CEDAW

Dalam kerangka hukum internasional, negara memiliki kewajiban positif untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak perempuan. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) menegaskan bahwa negara harus mengambil langkah-langkah legislatif dan administratif untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuk. Meksiko sebagai negara pihak CEDAW sejak 1981, secara normatif telah membuat berbagai reformasi hukum, termasuk pengakuan femisida sebagai kejahatan pidana. Namun demikian, implementasi nyata di lapangan masih sangat lemah. Dalam General Recommendation No. 35, komite CEDAW kembali menegaskan pengertian kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang sebelumnya telah dijelaskan dalam General Recommendation No. 19. Penegasan ini dimaksudkan untuk memperkuat pemahaman bahwa larangan terhadap kekerasan berbasis gender kini telah menjadi bagian dari prinsip hukum kebiasaan internasional. Rekomendasi tersebut juga menjadi acuan penting dalam membentuk praktik negara dan pandangan hukum internasional terkait isu ini. Selain itu, dalam Rekomendasi No. 35, kekerasan berbasis gender dijelaskan tidak hanya sebagai tindakan yang menghilangkan nyawa perempuan, seperti femisida, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap hak seksual dan kebiasaan ekonomi termasuk pelecehan dan pemaksaan. Selain itu, hak perempuan untuk hidup bebas dari kekerasan berbasis gender dianggap berkaitan erat dengan hak asasi lainnya, seperti hak untuk hidup, hak atas keamanan, serta bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang kejam atau tidak manusiawi.

CEDAW juga menggarisbawahi prinsip *due diligence*, yaitu kewajiban negara untuk secara aktif mencegah, menyelidiki, dan menghukum setiap bentuk kekerasan berbasis gender. Ketika negara gagal menjalankan prinsip ini, ia dapat dianggap turut bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia (Johansson, 2022, pp. 13-14). Dalam kasus Meksiko, kurangnya perlindungan terhadap perempuan, lemahnya sistem pelaporan, dan rendahnya tingkat hukuman terhadap pelaku femisida menunjukkan

ketidakpatuhan terhadap kewajiban internasional tersebut. Situasi ini tidak hanya mencerminkan kegagalan domestik, tetapi juga menjadi persoalan global mengenai akuntabilitas negara terhadap standar hak asasi manusia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis krisis femisida di Meksiko melalui perspektif *state failure* dan standar internasional CEDAW. Fokus utama penelitian adalah mengkaji faktor-faktor struktural seperti kelemahan institusi hukum, budaya patriarki, dan tingkat impunitas yang berkontribusi terhadap meningkatnya kasus femisida. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, dengan sumber seperti laporan Komite CEDAW, data dari INEGI dan Statista, serta sumber lain dari artikel jurnal maupun buku yang relevan dengan topik ini. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah hubungan antara komitmen hukum internasional dan realitas implementasi kebijakan di lapangan. Penelitian ini tidak hanya fokus pada analisis kerangka hukum formal, tetapi juga menyoroti pengaruh budaya patriarki serta lemahnya kapasitas institusi dalam menjamin perlindungan hak-hak perempuan. Tujuan akhirnya adalah untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kegagalan struktural negara dalam merespons kasus femisida serta mengidentifikasi berbagai hambatan dalam mewujudkan keadilan gender di Meksiko.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam beberapa dekade terakhir, kekerasan berbasis gender telah menjadi ancaman serius terhadap keamanan manusia, terutama bagi perempuan di negara-negara dengan institusi yang lemah. Femisida, sebagai bentuk paling ekstrem dari kekerasan terhadap perempuan, tidak bisa lagi dipahami hanya sebagai kejahatan individu, melainkan sebagai bentuk kegagalan struktural negara dalam memenuhi tanggung jawab dasarnya. Negara yang tidak mampu memberikan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan, apalagi membiarkan impunitas terjadi, hal tersebut mencerminkan karakteristik dari negara lemah. Dalam konteks ini, perlu untuk meninjau sejauh mana komitmen hukum internasional seperti CEDAW benar-benar diimplementasikan secara nyata untuk menjamin keadilan dan perlindungan yang setara bagi perempuan.

Salah satu bukti nyata lemahnya peran negara dalam menangani krisis femisida di Meksiko adalah tidak berjalannya sistem peradilan secara optimal untuk menghukum para pelaku. Berdasarkan laporan dari *Amnesty International* dan Komisi Nasional Hak Asasi

Manusia Meksiko mengungkapkan bahwa sebagian besar kasus pembunuhan terhadap perempuan tidak pernah mencapai proses pengadilan atau bahkan yang terhenti di tahap awal penyelidikan. Hal ini mencerminkan tingginya tingkat impunitas dalam sistem hukum Meksiko karena kasus femisida yang tidak terselesaikan. Korban dan keluarga mereka kerap kali dihadapkan pada berbagai rintangan dalam mencari keadilan, mulai dari aparat kepolisian yang lamban merespons, kurangnya investigasi forensik, hingga ketidakberpihakan jaksa terhadap korban. Situasi ini semakin diperparah oleh budaya patriarki yang masih mengakar di institusi hukum, yang kerap menyalahkan korban dan menganggap kekerasan terhadap perempuan sebagai urusan pribadi. Dalam konteks *state failure*, kondisi ini memperlihatkan betapa rendahnya kapasitas negara dalam menjalankan tanggung jawab utamanya yaitu melindungi dan menegakkan hukum secara adil bagi seluruh warga negara. Padahal, sebagai negara yang telah meratifikasi CEDAW, Meksiko memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hukum yang adil dan setara bagi perempuan, sebagaimana ditegaskan dalam *General Recommendation No.35* tentang akses terhadap keadilan bagi perempuan. Ketidakhadiran negara dalam proses investigasi dan penuntutan justru memperkuat normalisasi kekerasan dan memberikan ruang bebas bagi pelaku.

Meskipun undang-undang femisida di adopsi di berbagai provinsi di Meksiko, ternyata tidak serta-merta menurunkan angka femisida secara signifikan, karena negara tidak mampu menuntut dan menghukum pelaku secara konsisten. Kondisi ini membentuk sebuah paradoks, di mana negara mengakui femisida melalui legislasi, tetapi tidak mampu menindak secara serius. Faktanya, angka tetap tinggi, penuntutan rendah, dan korban kurang terlayani oleh sistem hukum (Romero, 2024, pp. 2-3). Hal ini mengindikasikan bahwa masalah utamanya bukan hanya karena hukum tidak ada, melainkan karena negara tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk menegakkan keadilan secara adil dan efektif, yang pada akhirnya mencerminkan krisis kepercayaan terhadap otoritas hukum dalam menangani kekerasan berbasis gender yang terjadi secara sistemik.

Minimnya anggaran, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta tidak adanya indikator keberhasilan yang jelas membuat kebijakan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap penurunan angka kekerasan. Dalam hal ini, Meksiko dinilai gagal memenuhi rekomendasi CEDAW untuk melakukan tindakan preventif berbasis data dan analisis gender, sebagaimana disebutkan dalam *General Recommendation No. 19* tentang kekerasan terhadap perempuan. Negara seharusnya menjadikan pencegahan sebagai pilar utama, termasuk dengan edukasi publik, reformasi budaya institusional, serta program

perlindungan berbasis komunitas. Akan tetapi, dalam praktiknya, negara menunjukkan ketidakseriusan dan cenderung abai terhadap akar struktural kekerasan, yang justru memperkuat siklus femisida.

Memiliki kerangka hukum yang luas tidak otomatis menjamin penegakan hukum yang efektif, dan di Meksiko, impunitas masih sangat merajalela. Artinya, ancaman, serangan, pembunuhan, atau tindak kriminal lainnya sering kali tidak dihukum. Dalam kasus kejahatan terhadap perempuan, budaya maskulin yang kuat juga tertanam dalam praktik impunitas tersebut. Ketidakadilan yang terjadi dalam kasus femisida dan kekerasan lainnya menunjukkan bahwa misogini telah menjadi praktik sosial yang umum dan kini bahkan mengakar dalam sistem peradilan. Meskipun Meksiko memiliki undang-undang federal untuk mencegah dan menghapus diskriminasi, banyak otoritas lokal tidak memiliki kemauan politik atau sumber daya untuk membentuk lembaga yang dapat menindaklanjuti pengaduan berdasarkan undang-undang tersebut. Lebih jauh lagi, dalam penanganan kasus berbasis gender, sering kali tidak terdapat perspektif gender dalam proses penyelidikan, penuntutan, maupun perlindungan korban, yang menyebabkan persoalan perempuan tidak ditangani sesuai dengan konteks dan kebutuhan spesifiknya (Frankenberger Martorell, 2020, pp. 52-53).

Krisis femisida di Meksiko menunjukkan disparitas geografis dan sosial yang sangat tajam, di mana perempuan yang tinggal di wilayah miskin, pedesaan, serta komunitas adat menjadi kelompok yang paling rentan. Kota seperti Ciudad Juarez di perbatasan utara Meksiko menjadi simbol global dari femisida, di mana selama bertahun-tahun terjadi pembunuhan berantai terhadap perempuan muda, buruh pabrik, dan migran yang tidak pernah tuntas ditangani. Ketidaksetaraan ekonomi, akses pendidikan yang rendah, serta stereotip berbasis gender berkontribusi besar terhadap kerentanan perempuan di wilayah tersebut. Negara tidak hanya gagal hadir dalam aspek perlindungan fisik, tetapi juga gagal menciptakan kondisi sosial yang memungkinkan perempuan untuk hidup aman dan bermartabat. Situasi ini menggambarkan bentuk diskriminasi struktural yang dikritik keras dalam CEDAW, di mana negara memiliki kewajiban untuk memperhatikan kelompok perempuan yang berada dalam posisi paling terpinggirkan. Namun, dalam kenyataannya, kebijakan perlindungan masih berpusat pada kota-kota besar dan kelas menengah, sementara perempuan miskin dan adat terus mengalami kekerasan tanpa perlindungan memadai. Diskriminasi struktural ini menunjukkan bagaimana kegagalan negara tidak hanya bersifat hukum dan administratif, tetapi juga sistemik, mencerminkan lemahnya komitmen negara dalam mewujudkan keadilan substantif bagi semua

perempuan tanpa terkecuali. Dalam konteks *state failure*, marginalisasi kelompok tertentu oleh negara mencerminkan kegagalan dalam menjalankan fungsi kesejahteraan dan kesetaraan sosial, serta mengganggu ketidakadilan dalam struktur kekuasaan.

Dari perspektif hak asasi manusia, negara memiliki tanggung jawab yang tidak bisa dinegosiasikan untuk melindungi seluruh warga negaranya dari bentuk-bentuk kekerasan ekstrem, terutama terhadap kelompok yang secara historis terdiskriminasi seperti perempuan. Negara yang gagal memberikan perlindungan atau bahkan abai terhadap kekerasan yang terstruktur adalah negara yang sedang mengalami disfungsi peran dasarnya. Lebih dari sekedar pelanggaran hukum, femisida di Meksiko mencerminkan absennya negara sebagai aktor pelindung dalam kontrak sosial modern (González, 2023, p. 209). Dalam situasi seperti ini, negara bukan hanya gagal mempertahankan legitimasi politiknya di hadapan masyarakat, tetapi juga memperkuat ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum dan institusi negara. Ketika negara membiarkan kekerasan terjadi secara berulang tanpa respons yang memadai, maka kontrak sosial antara negara dan warganya telah rusak secara fundamental, dan yang muncul bukan lagi rasa aman, melainkan hidup dalam ketakutan yang sudah dianggap sebagai hal biasa.

Meksiko sebagai anggota aktif komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk menjalankan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya melalui instrumen hukum seperti CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). Ratifikasi CEDAW membawa konsekuensi hukum dan moral bahwa negara wajib melindungi, mencegah, menghukum, dan memberikan pemulihan kepada perempuan korban kekerasan berbasis gender. Namun, realitas menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip ini belum maksimal, terutama dalam konteks femisida yang justru menunjukkan meningkatnya kekerasan ekstrem terhadap perempuan. Hukum internasional melalui konsep *due diligence* mengharuskan negara untuk bertindak secara aktif dan sistematis dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan. Prinsip ini mengatur bahwa negara yang gagal mencegah atau menindak kekerasan terhadap perempuan dapat dianggap melanggar kewajiban internasional. Konsep keadilan substantif menjadi kunci dalam memahami kegagalan negara. Keadilan tidak hanya diukur dari ketersediaan hukum, tetapi juga dari kemampuan hukum tersebut menjawab pengalaman dan kebutuhan perempuan. Hukum yang tidak mempertimbangkan pengalaman perempuan akan cenderung gagal dalam menciptakan perlindungan yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan transformasi hukum yang

mengintegrasikan perspektif gender, baik dalam substansi hukum maupun dalam praktik yudisial dan administratif.

5. KESIMPULAN

Berangkat dari krisis femisida di Meksiko, studi ini menunjukkan bahwa implementasi standar internasional seperti CEDAW membutuhkan lebih dari sekadar ratifikasi formal, dibutuhkan keseriusan negara dalam membangun sistem perlindungan yang responsif, inklusif, dan adil bagi seluruh perempuan. Ketimpangan kapasitas antara kebijakan hukum dan realitas lapangan, terutama dalam konteks budaya patriarki dan tingginya impunitas, menegaskan perlunya dukungan internasional yang lebih solid, seperti asistensi teknis, pelatihan gender bagi aparat hukum, serta penguatan masyarakat sipil dalam mengawal keadilan. Meski CEDAW menawarkan kerangka hukum yang progresif, perbedaan interpretasi hukum serta lemahnya kapasitas institusional lokal menjadi tantangan serius dalam penerapannya.

Dengan demikian, perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan ekstrem tidak bisa hanya bertumpu pada upaya penegakan hukum, tetapi harus disertai reformasi sosial dan politik yang menargetkan akar persoalan struktural, seperti ketimpangan sosial, kemiskinan, serta subordinasi gender dalam tatanan budaya dan institusi. Femisida di Meksiko sebagian besar menimpa perempuan dari kelompok marjinal miskin, adat, dan buruh migran, yang hidup dalam kerentanan berlapis. Oleh karena itu, pendekatan internasional terhadap perlindungan gender harus memperhatikan konteks lokal secara lebih serius dan tidak mengabaikan fakta bahwa kejahatan terhadap perempuan sering kali berakar dari kegagalan sistemik yang melampaui batas-batas hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Frankenberger Martorell, M. (2020). *Words kill: The failure of the Mexican state to counter gender-based violence through online hate speech targeting women and girls*. [Tidak disebutkan nama penerbit atau jurnal].
- García Del Moral, P. (2016). Feminicidio, transnational legal activism, and state responsibility in Mexico. [Tidak disebutkan nama jurnal atau penerbit].
- González, E., & [Nama lengkap kedua tidak lengkap]. (2023). Impunity and institutional inaction: Femicide and state response in Mexico. *Gender and Development*, 31(2), 199–214. <https://doi.org/10.1080/13552074.2023.2201119>

- Hayati, N. Z. (2023). *Kegagalan Meksiko terhadap CEDAW dalam penanganan femicide pada pemerintahan Presiden Andres Manuel Lopez Obrador 2019–2021* (Tesis, [Nama universitas tidak dicantumkan]), 1–70.
- Hefti, A. (2022). *Conceptualizing femicide as a human rights violation: State responsibility under international law*. Edward Elgar Publishing.
- INEGI. (2025). *Registered deaths statistics (EDR): Deaths by homicide*. INEGI. Retrieved June 26, 2025, from https://en.www.inegi.org.mx/programas/edr/#tabular_data
- Johansson, F. (2022). *Femicide as a form of gender-based violence against women in international human rights law: Critique of current regulation and suggestions for future development*. [Tidak disebutkan penerbit].
- Martin Griffiths, T., & O'Callaghan, S. (2008). *International relations: The key concepts* (2nd ed.). Routledge.
- Menjívar, C., & Walsh, S. D. (2017). The architecture of feminicide: The state, inequalities, and everyday gender violence in Honduras. *Latin American Research Review*, 52(2), 221–240. <https://doi.org/10.25222/larr.73>
- Romero, R. G. (2024). Femicide laws, unilateral divorce, and abortion decriminalization fail to stop women's killings in Mexico. *arXiv preprint*, arXiv:2407.06722, 1–44. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2407.06722>
- Rosyidin, M. (2022). *Teori hubungan internasional: Dari perspektif klasik sampai non-Barat* (2nd ed.). Rajawali Pers.
- Rotberg, R. I. (2004). *When states fail: Causes and consequences*. Princeton University Press.
- Statista. (2025a). *Femicide rate in Mexico from 2017 to 2024 (number of victims per 100,000 women)*. Statista Research Department. Retrieved June 26, 2025, from <https://www.statista.com/statistics/979065/mexico-number-femicides/>
- Statista. (2025b). *Number of femicide victims in Mexico from 2015 to 2024*. Statista Research Department. Retrieved June 26, 2025, from <https://www.statista.com/statistics/827142/number-femicide-victims-mexico/>